

## PERAN PENYULUH BERBASIS MASYARAKAT DALAM MEMPERTAHANKAN HUTAN JANDA (KAOMBO OHUSII) DI KABUPATEN BUTON SULAWESI TENGGARA

<sup>1</sup>M. Najib Husain, <sup>2</sup>Basrudin, <sup>3</sup>Abdul Jalil, <sup>4</sup>Adrian Tawai, <sup>5</sup>Dewi Anggraini

Universitas Halu Oleo

Correspondent author: [muh.najib.husain@gmail.com](mailto:muh.najib.husain@gmail.com)

Kendari, 93231, Indonesia

### Abstract

*This study aims to explore the management practices of Widow Forest (Kaombo Ohusii) in Buton Regency through the lens of local wisdom and development communication, by revealing the social, cultural, and environmental dynamics involved in forest management. This study uses a variety of data collection methods. Participant observation allows researchers to be directly involved in Widow Forest management activities, observe the practices carried out, and interact with local communities and other parties involved in natural resource management. In-depth interviews will be conducted with widows, poor women, community leaders, government officials, and non-governmental organizations involved in the management of Widow Forest. The results of the study show that community-based extension by traditional officials in Takimpo Village in the management of Widow Forest (Kaombo Ohusii) is an example of effective local participation in sustainable natural resource management. The involvement of this traditional institution also shows the importance of integrating local values in development, ensuring that decisions taken are in accordance with community expectations, and supporting environmental conservation and community empowerment.*

**Keywords:** Community Base; Role of Extension Officers; Widow Forest

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik pengelolaan Hutan Janda (Kaombo Ohusii) di Kabupaten Buton melalui lensa kearifan lokal dan komunikasi pembangunan. Dengan mengungkap dinamika sosial, budaya, dan lingkungan yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang beragam. Observasi partisipan yang memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan Hutan Janda, mengamati praktik-praktik yang dilakukan, serta interaksi antara masyarakat lokal dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Wawancara mendalam yang akan dilakukan dengan para janda, perempuan miskin, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Janda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan berbasis masyarakat oleh perangkat adat di Kelurahan Takimpo dalam pengelolaan Hutan Janda (Kaombo Ohusii) merupakan contoh partisipasi lokal yang efektif dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Keterlibatan lembaga adat ini juga menunjukkan pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dalam pembangunan, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan harapan komunitas, serta mendukung pelestarian lingkungan dan penguatan masyarakat.

**Kata Kunci:** Peran Penyuluh; Basis Masyarakat; Hutan Janda

## PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk membantu petani agar mampu mengatasi permasalahan kerusakan hutan adat, adalah melalui penyuluhan pertanian. Namun, penyuluhan pertanian di Buton dihadapkan pada beberapa permasalahan. Permasalahan itu adalah keterbatasan tenaga penyuluh, yang diperburuk dengan penempatan tenaga penyuluh yang tidak proporsional antarkecamatan dan keterbatasan biaya operasional memperparah jalannya aktivitas penyuluhan pertanian di Kabupaten Buton.

Relatif rendahnya ketersediaan biaya operasional penyuluhan dan tingginya biaya transportasi menyebabkan pelaksanaan penyuluhan melalui komunikasi interpersonal secara rutin per periode tertentu sulit dilakukan. Terutama untuk pelaksanaan penyuluhan di desa-desa yang letaknya relatif jauh dari kota kabupaten dan kecamatan. Penempatan tenaga penyuluh pertanian lebih banyak terdistribusi di desa-desa di sekitar kawasan sentra produksi pangan (padi). Kondisi ini menyebabkan para petani di luar kawasan sentra pangan (mayoritas populasi petani di Buton), sulit mendapatkan informasi pertanian melalui penyuluhan pertanian. Mengingat tujuan penyuluhan pertanian tidak hanya sebatas menginformasikan/memberi tahu (*to inform*) melainkan juga untuk mengubah sikap dan perilaku petani. Untuk mengubah sikap dan perilaku petani, terutama pada petani-petani tradisional dan tingkat pendidikan rendah, penyuluhan pertanian perlu dilakukan melalui pendekatan persuasif dan partisipatif dengan komunikasi interpersonal dan berlangsung secara berkelanjutan.

Selama ini penyuluhan pertanian di pedesaan dilakukan oleh penyuluh pertanian formal. Model penyuluhannya adalah dengan pendekatan individu dan kelompok melalui kelompok tani. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan di lapangan, terlihat bahwa di desa-desa yang beragroekosistem lahan kering, umumnya kelompok tani kurang aktif. Kelompok tani hanya aktif bila ada kegiatan-kegiatan proyek.

Adanya keterbatasan SDM penyuluh pertanian dan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, serta kurang aktifnya kelompok-kelompok tani menyebabkan implementasi penyuluhan pertanian secara persuasif partisipatif di Kabupaten Buton sulit diwujudkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penyuluhan pertanian *existing* dengan mengandalkan penyuluh pertanian formal dan kelompok tani semata sebagai saluran komunikasi dalam penyuluhan pertanian di pedesaan Kabupaten Buton kurang efektif dan produktif.

Menjembatani kesulitan mewujudkan penyuluhan pertanian secara persuasif partisipatif di pedesaan Kabupaten Buton yang disebabkan oleh kurangnya SDM penyuluh pertanian, rendahnya biaya operasional penyuluhan pertanian, tingginya biaya transportasi, domisili penyuluh pertanian antarpulau dengan desa binaan/wilayah kerja, serta kelompok

tani kurang aktif, adalah dengan memberdayakan kelembagaan lokal yang merupakan *social capital* di pedesaan di dalam sistem penyuluhan pertanian di tingkat desa sebagai media komunikasi. Melibatkan kelembagaan lokal di dalam sistem penyuluhan pertanian merupakan tantangan dan peluang untuk meningkatkan efektifitas penyuluhan pertanian di Kabupaten Buton.

Subejo (2006), mengatakan bahwa tantangan untuk mengintrodusir suatu sistem institusi baru yang lebih sesuai menjadi pertimbangan dalam mereformasi sistem penyuluhan pertanian. Mengingat transformasi penyuluhan pertanian sedang berlangsung di seluruh dunia, dan perubahan terjadi pada organisasi, sistem penugasan, dan praktek sistem penyuluhan pertanian dan pedesaan.

Sumardjo (1999) dalam disertasinya menyarankan, bahwa perlu dilakukan penelitian untuk menggali potensi kelembagaan lokal yang dapat menjadi media pengembangan inovasi bagi sistem agribisnis dan sistem usaha tani. Menurut Sumardjo (1999) pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan memberdayakan kelembagaan lokal sebagai media pengembangan inovasi dengan pendekatan komunikasi relasional dan *convergence* menempatkan martabat petani secara lebih layak. Petani dengan berbagai kepentingan dan kemampuannya menjadi lebih dikenali dan dihargai. Cara ini lebih mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat yang lebih tinggi melalui Kelembagaan lokal/kelompok social

Kelembagaan lokal atau kelompok-kelompok sosial yang merupakan *social capital* yang dapat diberdayakan sebagai media komunikasi (*communication channe*)l dalam proses penyuluhan pertanian harus memenuhi persyaratan tertentu guna menunjang terbangunnya suatu proses komunikasi relasional yang baik sehingga menghasilkan kesepemahaman komunikasi (*convergence*) yang tinggi.

Persyaratan penting bagi kelembagaan lokal/kelompok sosial yang akan diberdayakan sebagai *communication channel* dalam proses penyuluhan pertanian, diantaranya adalah harus memiliki basis komunitas akar rumput yang kuat, *legitimate*, di hormati, dan tokoh sentralnya dipatuhi himbauannya di dalam lingkungan sosialnya. Selain itu, pemberdayaan kelompok sosial sebagai media/saluran komunikasi pembangunan di Kabupaten Buton juga perlu didasarkan pada adanya kepatuhan masyarakat pada norma-norma sosial, adanya hubungan sosial yang solid antara pemimpin kelompok dengan komunitasnya, dan adanya jejaring sosial inter dan intra kelompok yang baik.

Kelembagaan lokal yang memenuhi persyaratan tersebut adalah kelembagaan lokal berbasis adat di pimpin oleh Parabela di Kelurahan Takimpo. Pesan-pesan pembangunan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh sentral kelembagaan lokal akan membantu percepatan penyampaian informasi dan inovasi teknologi pertanian kepada

para petani anggota komunitasnya di tataran *grassroot* dan berpeluang memunculkan *grassroots technology (tacit knowledge)* ke permukaan.

Dengan diberdayakannya tokoh-tokoh sentral di dalam kelembagaan lokal/kelompok sosial di pedesaan sebagai saluran komunikasi yang menjembatani komunikasi antara penyuluh pertanian (nara sumber informasi inovasi teknologi) dengan petani, diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan penyuluhan pertanian. Para tokoh sentral kelembagaan lokal yang menyampaikan pesan inovasi teknologi kepada khalayak komunitas di dalam sistem sosialnya diharapkan akan mempermudah penerimaan pesan oleh petani.

Adanya kemudahan dalam penyampaian dan penerimaan pesan-pesan inovasi oleh petani diharapkan dapat meningkatkan *human capital* petani komunitas kelompok sosial. Selain itu, dengan memberdayakan tokoh sentral di dalam kelompok sosial sebagai komunikator dengan latar belakang pengalaman bidang pertanian yang relatif sama dengan para anggota komunitas, maka akan terbangun suatu komunikasi dialogis yang produktif. Dengan demikian, akan membantu memudahkan di dalam proses identifikasi permasalahan yang dirasakan petani. Permasalahan petani teridentifikasi kemudian diteruskan secara kolektif kepada para penyuluh maupun petugas pertanian lainnya untuk mendapatkan solusinya. Proses penyuluhan seperti ini akan membantu mempermudah akses petani terhadap informasi, inovasi teknologi, maupun permodalan.

Melibatkan para tokoh sentral kelembagaan/kelompok sosial di pedesaan sebagai media komunikasi, maka akan memperbanyak saluran komunikasi (*multi channel*) di dalam proses diseminasi dan penyuluhan pertanian. Semakin banyak saluran komunikasi interpersonal penyuluhan pertanian di pedesaan akan mendorong lahirnya penyuluh-penyuluh pertanian swadaya yang produktif. Semakin banyak penyuluh pertanian swadaya akan menunjang adanya transformasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, seperti dikemukakan oleh Budiarno *et. al.* (2004), bahwa perlu ada pemikiran transformasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh petani, pemerintah hanya menyediakan dana pendamping yang dapat diakses oleh masyarakat petani.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengkaji penyelenggaraan penyuluhan pertanian berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Parabela dan perangkat adat dalam mempertahankan dan melestarikan hutan janda. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Penyuluh Berbasis Masyarakat Dalam Mempertahankan Hutan Janda (*Kaombo Ohusii*) di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara.

## METODE

Untuk mengeksplorasi praktik pengelolaan Hutan Janda (Kaombo Ohusii) di Kabupaten Buton melalui lensa kearifan lokal dan komunikasi pembangunan, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi seperti yang dianjurkan oleh Liao dkk. (2021) dan Sarmiento Barletti dkk. (2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam perspektif, praktik, dan nilai-nilai budaya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang beragam. Observasi partisipan yang memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan Hutan Janda, mengamati praktik-praktik yang dilakukan, serta interaksi antara masyarakat lokal dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Wawancara mendalam yang akan dilakukan dengan para janda, perempuan miskin, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Janda. Wawancara ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai budaya, praktik komunikasi pembangunan, serta tantangan dan peluang dalam pelestarian kearifan lokal (Chaudhary dkk., 2022). Studi dokumen yang akan mengkaji dokumen-dokumen terkait, seperti laporan, peraturan, dan catatan historis yang berkaitan dengan pengelolaan Hutan Janda berbasis kearifan lokal dan komunikasi pembangunan (Fernández-Llamazares dkk., 2021).

Analisis data dilakukan secara induktif, dengan mengidentifikasi tema-tema dan pola-pola utama yang muncul dari data yang dikumpulkan (Shen dkk., 2020). Proses ini melibatkan coding, kategorisasi, dan interpretasi data untuk mengungkap makna dan dinamika yang terkait dengan pengelolaan Hutan Janda berbasis kearifan lokal dan peran komunikasi pembangunan dalam proses tersebut. Untuk memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian, penelitian ini menggunakan triangulasi, di mana data dikumpulkan melalui berbagai metode dan sumber, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Rai & Sundriyal, 2021). Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal secara komprehensif dan dari sudut pandang yang beragam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hutan Janda (Kaombo Ohusii) Di Kabupaten Buton

Setiap masyarakat adat yang ada di Indonesia memiliki kearifan lokal dalam menjaga lingkungan, baik dalam bentuk adat maupun dalam bentuk kawasan. Komunitas masyarakat adat di beberapa daerah di Pulau Buton juga memiliki kearifan lokal dari kedua bentuk tersebut. Di Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo ada sebuah kawasan *Kaombo* yang sampai saat ini masih tetap terjaga kelestariannya. Di dalam kawasan *Kaombo* tersebut pun telah terbagi-bagi ke dalam beberapa bagian yang disesuaikan

dengan fungsinya masing-masing. Ada 5 kawasan *Kaombo* yang terdapat di Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo, yaitu *Kaombo Ohusii* (dalam Bahasa Buton, kata *Ohusii* bermakna bambu-bambu kecil), *Kaombo wee* (dalam Bahasa Buton, *wee* bermakna air), *Kumbo*, *Kaombo Wee Ambali* (*wee*=air, *ambali*=di balik) dan *Kaombo Labhou-bhou*.

Hutan *Kaombo* memiliki makna sebagai hutan yang dilindungi, dimana arti dari *Kaombo* sendiri dalam Bahasa Buton yakni "sesuatu yang dilindungi". Hutan *Kombo* bagi masyarakat Takimpo merupakan hutan yang senantiasa mereka lindungi dan sayangi karena di dalam hutan tersebut terkandung banyak sekali sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup masyarakat. Selain itu, penduduk Takimpo juga memegang sebuah kepercayaan bahwasannya di dalam Hutan *Kaombo* masih terdapat campur tangan para leluhur mereka yang mana apabila dirusak akan mengakibatkan kemarahan dari leluhur-leluhur tersebut.

Kepercayaan para masyarakat adat di sana melahirkan sebuah pemikiran yang kokoh akan pentingnya sebuah tatanan masyarakat yang beradab dan bermoral, tidak hanya dalam hal pengelolaan dan pelestarian hutan, akan tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan mereka. Olehnya itu, berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian ini, masyarakat di sana secara mutlak tunduk dan patuh terhadap ketentuan adat dalam masyarakat yang dipegang oleh para tokoh adat.

Dari kelima kawasan *Kaombo* yang telah disebutkan sebelumnya, kawasan *Kaombo Ohusii* merupakan titik fokus pada penelitian ini, yakni salah satu kawasan dari *Kaombo adat* yang terdapat di Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten buton yang sampai saat ini masih tetap terjaga kelestariannya. Secara umum, memang dalam hal pengelolaan kawasan *Kaombo* sendiri tidak terpisah satu sama lain. Jadi, ketika kawasan yang lainnya telah dikelola, maka otomatis *Kaombo Ohusii* pun akan ikut dikelola. Rupanya, sejak zaman dahulu, sewaktu Takimpo masih berada di daerah kampung lama, *Kaombo Ohusii* telah diperuntukkan bagi para *Mowine cia komoane* (perempuan tak bersuami) atau *mowine misikinino* (perempuan-perempuan miskin) yang susah mendapatkan kebutuhan kesehariannya. Di dalam kawasan tersebut 75% ditumbuhi oleh tanaman *Ohusii* (bambu-bambu kecil), sebagian kayu-kayu yang tidak terlalu besar, tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan anyaman seperti rotan-rotan kecil, tanaman pakis haji, enau, dan tanaman-tanaman menjalar lainnya. Masyarakat dahulu memanfaatkan hasil dari *Kaombo Ohusii* sebagai bahan bahan dinding rumah, bahan anyaman tradisional untuk kemudian dijual, bahan kebutuhan rumah tangga seperti mengambil kayu bakar di dalamnya, dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangannya waktu sampai pada berpindahnya masyarakat adat Takimpo Lipuogena yang tadinya bermukim di pegunungan kemudian pindah ke

pesisir, fungsi dari kawasan *Kaombo Ohusii* yang tadinya sangat dirasakan manfaatnya oleh para janda dan perempuan-perempuan miskin serta perempuan tua, berubah menjadi kurang diperhatikan. Selain itu, berapa kebutuhan hidup yang dahulu hanya bisa mereka dapatkan di sana, kini bisa didapatkan di tempat lain, contohnya mereka bisa mendapatkan atap dengan membeli di toko. Begitupun keperluan rumah tangga lainnya.

Berangkat dari beberapa ulasan sejarah *Kaombo Ohusii* tersebut, ada versi baru dalam hal pengelolaan kawasan tersebut yang telah dipaparkan oleh beberapa informan dalam penelitian ini. Sebenarnya inti dari pengelolannya tidak jauh beda, hanya saja sekarang bukan hanya janda atau para perempuan miskin yang dapat mengolah hasil dari *Kaombo Ohusii*, akan tetapi masyarakat lain juga dapat mengelolanya dengan beberapa ketentuan. Pengelolaan kawasan hutan yang disepakati bersama para tetua adat Takimpo. Adapun pola pengelolannya mengacu pada pola pengelolaan SF (*Social Forestry*), yaitu suatu bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat lokal. Keberhasilan *reforestation* akan meningkatkan fungsi hutan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan sosial. Beberapa informasi dari para informan mengatakan bahwasannya dalam hal pengelolaan kawasan *Kaombo Ohusii* selama ini telah menjadi kesepakatan bersama para tokoh adat dan masyarakat adat itu sendiri, dimana masyarakat dilibatkan setiap kegiatan pengelolaan hutan, seperti pembersihan kawasan hutan, pengambilan hasil kayu di dalamnya, dan beberapa ritual adat yang dilakukan di dalamnya. Hal ini dikuatkan oleh penuturan salah seorang informan yang berstatus sebagai *Parabela* (pemangku adat tertinggi pada masyarakat Buton) sebagai berikut:

"*Kaombo Ohusii* atau kita di sini sebut dia *Kaombo* janda sebenarnya, itu kita orang kelola dia sama-sama warga di sini. Entah itu janda atau bukan janda. Karena memang dulu itu waktu masih belum pindah di sini, masih di kampung lama, itu hutan *Ohusii* peruntukannya hanya untuk janda to. Jadi kalau dulu itu tidak boleh yang bukan janda masuk ambil bambu yang disebut *ohusii* itu, harus janda sendiri. Tapi sekarang, tidak lagi. Kita kelola rame-rame, mulai dari bersihkan rumput-rumput liar, bersihkan bambu-bambu yang sudah terlalu rumpun sampe pangkas dahan-dahan di dalam *Kaombo sii* itu. Kebetulan juga tiap tahun ada acara pesta adat, kita juga harus pergi lapor di kampung lama, di tempatnya *sii mi* itu". (wawancara bersama Bapak La Aisi 75 tahun).

Terkait dengan pola pengelolaan kawasan *Ohusii* tersebut, saudara Sardin, salah satu tokoh pemuda di Kelurahan Takimpo (28 tahun) menjelaskan sebagai berikut:

"Masalah hutan janda ini sebenarnya kita di sini sudah anggap sebagai sesuatu yang sakral. Kenapa? Karena kalau katong punya kepercayaan di daerah sini yah masih menganggap macam tanaman-tanaman di sana itu ada penunggunya begitu. Jadi katong itu tiap tahun ada pesta kampung. Nah sebelum pelaksanaan pesta itu, para orang tua kampung itu domong pergi taroh sesajen di lipu sana. Istimahnya kan kita minta izin kalau mau adakan pesta, izin sama yang punya hutan kan. Kalau waktu katong ke sana itu sama-sama orang tua kampung, terus kita bersihkan hutan yang disebut *Kaombo* atau *Kumbo* itu. Ha termasuk juga kawasan *sii* itulah. Kita bersihkan baru kalau ada warga yang mau ambil macam bambu-

bambu atau rotan-rotannya yah bisa mi saat selesai kerjanya itu. Intinya kita kelola hutan ini supaya selamat kita punya hidup, apalagi kalau kita piara bae-bae itu hutan sudah sumber airnya kita di sini kasian, utamanya untuk air minum kita.

Berdasarkan pemaparan dari kedua informan di atas, yang satu sebagai *parabela* dan yang satu lagi sebagai tokoh pemuda di Kelurahan Takimpo, dapat diketahui bahwasannya pengelolaan kawasan *Kaombo Ohusii* saat ini telah melibatkan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kaum janda dan perempuan miskin, akan tetapi siapapun yang memerlukannya bisa mengambil hasil dari hutan itu untuk keperluan hidupnya dengan beberapa ketentuan yang telah disepakati bersama para tokoh adat. Di antara ketentuan terkait siapa saja yang dapat mengambil hasil hutan tersebut adalah jika mereka yang mengambilnya bukan dari kaum janda atau perempuan miskin, maka apa yang telah diambil itu tidak boleh dijual, hanya untuk keperluan pribadi saja. Lain halnya dengan para janda yang boleh mengambil hasil hutan dan bisa menjualnya jika mau. Meskipun ketentuan umumnya memang setiap yang hendak mengambil hasil hutan harus melalui izin dari *Parabela*.

Para masyarakat di sekitar *Kaombo Ohusii* telah memaklumi perihal pengelolaan kawasan tersebut. Mereka menghormati *Parabela* sebagai pihak pengambil kebijakan di lingkungan mereka. Olehnya itu, tidak ada yang berani mengelola hasil *Kaombo*, utamanya yang dapat mengasilkan keuntungan secara pribadi saja. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Bapak La Saja 80 tahun, selaku *Pocuno Limbo* (Kaki tangan *sara*; dalam Bahasa Buton *Sara* berarti adat) sebagai berikut:

*“ipiama rii, sii ana katamo tobagee mai janda wite karna moia cia danee mohaneno kan. Jari misalkan danee kebutuhanno, bisamo lewat Kaombo sii. Posala memang, zaman sekarang kan ciamo napoita mai ipiama. Bhacanggihimo istilahno. Jari kebutuhan secara keseluruhan kebanyakan dobhalu l daoa. Sekarang biarpun ciano janda silahkan mengolah sii itu, asal saratino kolie bhawae l daoa. Kalau janda l daoa, l kaana boleh-boleh saja. (Dulu memang sii ini hanya kita utamakan untuk kaum janda karena mereka sudah tidak memiliki suami. Jadi misalkan ada kebutuhan untuk di dalam rumah, mereka bisa ambil di kaombo itu. Memang sudah sangat berbeda. Zaman sekarang tidak sama lagi dengan zaman dulu. Sekarang ini kalau mau dapatkan keperluan di rumah, para janda bisa pergi ke pasar. Sekarang sudah canggihmi katanya. Apa-apa bisa dibeli di pasar. Sekarang biarpun yang bukan janda bisa mengolah hasil hutan janda dengan ketentuan tidak boleh dijual di pasar. Kalau janda, mau dibawa ke pasar atau untuk di rumah saja, boleh.”*

Hal ini dipertegas pula oleh seorang *Wati* (tangan kiri *Parabela*) sebagai berikut:

*“masyarakat kaina sawutae dokonie bahwa o sii rii, zaman dulu katamo buat janda dan wanita miskin. Posala mai hari ini, o sara sudah memberikan izin sepenuhnya (masyarakat di sini semua sudah mengetahui perihal hutan janda dan ketentuan pengelolaannya zaman dulu yang berbeda dengan saat ini. Pihak adat telah memberikan keleluasaan terkait pengelolaan hutan janda. Jadi, misalnya kalau ada masyarakat yang mau pi ambil kayu atau bambu di sii, itu harus izin dulu sama*

*parable*. Kalau diizinkan bisa langsung diambil. Dan juga kalau habis menebang di dalam hutan itu, sisa-sisanya dibersihkan baru dirapikan, tidak boleh dibakar di dalam hutan karena takut nanti menyebar apinya. ”

Jika kita memperhatikan pemaparan dari kedua informan tersebut, akan jelas tergambar bahwasannya masyarakat di Kelurahan Takimpo benar-benar arif dalam mengelola kawasan hutan janda. Meskipun fungsi dari hutan janda itu sendiri sudah mengalami perubahan yang tadinya hanya dikhususkan bagi janda-janda dan sekarang masyarakat umum pun bisa mengambilnya, akan tetapi perlakuan terhadap hasil-hasil hutan itu masih senantiasa dijaga. Banyak hal yang menjadi pertimbangan masyarakat Takimpo untuk selalu bersikap arif terhadap lingkungannya terutama hutan, di antaranya kesadaran akan pentingnya kawasan hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Selain itu, kepercayaan terhadap keramat yang terkandung di dalam kawasan *Kaombo* juga menjadi alasan utama tetap bertahannya mereka pada kearifan lokalnya itu. Meskipun secara umum masyarakat telah mengetahui adanya kawasan *kaombo* sebagai warisan suci leluhur mereka di masa lalu, namun terkait dengan spesifikasi *kaombo* itu sendiri ada sebagian yang kurang mengetahuinya langsung, akan tetapi mendengar saja dari penuturan para tokoh adat jika ada pelaksanaan pesta kampung. Seorang informan menjelaskan sedikit pengetahuannya tentang pengelolaan hutan janda itu. Beliau mengatakan:

“Beta memang su lama tinggal di sini tapi apa itu *Kaombo ohusii* belum pernah dengar jua. Cuma itu kalau tiap ada pesta kampung kaya sebelum orang tua turun di bawah untuk sembelih kambing atau ayam, mereka itu sebelumnya naik di lipu. Di sana kan ada Baruga tempat kumpulnya domong. Mungkin di situ ada katongpun orang-orang tua yang lalu-lalu su tidak ada. Karna di kampung ini adatnya memang kuat”.

Hal yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Ibu Muniasi 42 tahun, sebagai berikut:

*“O kumbo atau kaombo, indau ciakumonie sawutae paraeno istilahno.bhitamo nikonu' u kah, kalau tokamaso l lalono Kaombo, harus toizin l mancuano kampo. Isami kairi danee Parabela, danee wati, danee sarano agama, pocuno limbo. Dohata. Moia nokonie aipomo sawutae. Hehehe paraenomo tokabisara aso nake. Hawitemo kalau cumala hasililo l lalo kecuali izin dulu, baru cia mbali ambil yang masih muda-mudanya tanaman l lalo. (entahlah apa istilahnya, Kumbo kah atau kaombo, saya tidak terlalu tau semuanya. Sepengetahuan saya kalau mau masuk di dalamnya harus minta izin terlebih dahulu kepada orang tua kampung. Kami di sini ada parabela, wati, tokoh agama, banyak. Mereka pasti mengetahui semuanya. Hehehe. Mungkin saya berbicara sembarangan. Hanya yang saya tau juga, waktu ada yang ambil hasil Kaombo, mereka harus melalui izin diperbolehkan mengambil tanaman di dalamnya yang masih muda.”*

Berdasarkan penuturan dari kedua informan tersebut, dapat diketahui bahwasannya meskipun saat ini oleh sebagian orang *Kaombo Ohusii* (Hutan Janda) sudah tidak diketahui secara mendetail, akan tetapi terkait pengelolaannya masih bisa diketahui dari para tokoh

adat yang ada di sana, terkait kaidah-kaidah yang diberlakukan oleh *sara*, dan beberapa hal lain yang ada kaitannya dengan hutan janda.

*Kaombo Ohusii* juga ternyata memiliki peranan penting jika telah dikelola dengan baik. *sii* dan tumbuhan penghasil barang anyaman lainnya yang tumbuh di dalam kawasan itu telah banyak digunakan untuk alat perabot rumah tangga dan beberapa keperluan lainnya oleh masyarakat.

Tumbuhan *sii* yang banyak tumbuh di dalam kawasan *Kaombo Ohusii*. Oleh masyarakat Takimpo masa kini, tanaman yang berada di dalam kawasan Hutan Janda senantiasa dijaga dan tidak dibiarkan terlalu rimbun. Gambar sebelah kanan adalah *sii* yang baru saja diambil sehingga muncul tunas-tunas baru. Seperti itulah gambaran pengelolaan kawasan Hutan janda oleh masyarakat di sana, yakni dengan mengambil hasilnya serta merawat sisa pengambilan tersebut agar kemudian dapat dimanfaatkan lagi ke depannya.

Selain tanaman *sii*, ada pula beberapa jenis kayu besar yang tumbuh di dalam Hutan Janda dan itu kadang dikelola untuk bahan pembuatan rumah penduduk, tentunya dengan kesepakatan bersama para tokoh adat di sana.

Jika zaman dahulu masyarakat yang mengambil hasil dari Hutan Janda kebanyakan dijadikan barang anyaman dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang, maka sekarang juga ada yang mengolahnya sebagai barang anyaman, akan tetapi untuk dipakai di rumah sendiri saja. Hasil olahan dari bambu-bambu dan rotan-rotan kecil tadi dijadikan sebagai lantai rumah beberapa warga, sebagai nyiru, tempat tidur ayam, ada juga yang memanfaatkannya sebagai hiasan di depan rumah dan sebagai dinding mereka.



**Gambar 1.** Lantai (*rante*) dan dinding rumah (*laja-lajai*) yang diolah dari hasil Hutan Janda

Hasil-hasil olahan dari Hutan janda dapat dilihat pada gambar 1. Masyarakat yang memanfaatkan bambu-bambu kecil itu menyatakan bahwasannya sudah beda pemanfaatan hasil *Kaombo Ohusii* antara zaman dulu dengan sekarang. Dahulu, hasil dari hutan janda seperti yang terlihat pada gambar 3 selalu dijual ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga, tapi sekarang para janda sudah tidak pernah lagi melakukan hal itu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu M (nama disamarkan) sebagai berikut:

“sekarang *Kaombo Ohusii* itu tidak seperti dulu lagi. Memang kita masih perhatikan tapi bedalah dengan dulu. Kalau dulu itu masih susah kita hidup para janda, jadi kalau mau cari kayu bakar, mau bikin rumah, bikin keranjang-keranjang semua itu dari *sii mi* itu. Karena sekarang mobil sudah lancar pulang-bale, jadi kalau mau bikin rumah atau cari perlengkapan rumah, bisa dipesan di Kota sana. Tidak sama dengan dulu, masih belum ada tempat naiknya kita. Baru kan dulu itu betul-betul belum ada pikiran mau usaha yang lain kasian, jadi kita itu diperhatikan sama sara di sini namanya.

Ternyata selain karena lokasi kampung Takimpo yang sudah berpindah ke pesisir, yang membuat pengelolaan *Kaombo Ohusii* tidak sama seperti dulu adalah karena perkembangan alat transportasi zaman sekarang, sehingga berbagai kebutuhan hidup para janda sudah bisa diperoleh langsung dari kota. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan telah mendorong para masyarakat untuk berpikir lebih maju dengan memberikan bantuan kepada para janda dan perempuan miskin. Hal ini juga sebenarnya tidak terlepas dari peran para tokoh adat yang terdapat di Kelurahan Takimpo. Terlepas dari perbedaan cara pengelolaannya, yang paling penting adalah sampai saat ini kawasan *Kaombo Ohusii* masih selalu mendapatkan perhatian yang intens dalam hal pengelolaannya.

Selain seperti terlihat pada gambar 3 tersebut, masih ada hasil dari Hutan Janda yang dikelola oleh masyarakat di sana.



**Gambar 2.** *Kaanano manu*, *katepi* dan *Pagara* merupakan hasil dari Hutan Janda yang masih da saat ini.

Beberapa hasil anyaman itu sengaja diperlihatkan saat salah satu informan menjelaskan tentang pentingnya keberadaan *tanah Kaombo* selama ini. Meskipun keberadaannya tidak dikhususkan lagi bagi kaum janda, akan tetapi banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari tanaman yang tumbuh di dalamnya. Dalam beberapa pemaparan yang disampaikan oleh mereka juga, ternyata ada peranan dari para tokoh adat dalam pengelolaan kawasan Hutan janda. Parabela dan perangkatnya menjalankan fungsi penyuluhan dalam yang meminimalisir adanya tindakan-tindakan eksploitasi lingkungan oleh masyarakat setempat. Tentu ini merupakan suatu kearifan yang harus senantiasa dipertahankan ke depannya.

### **Fungsi Lembaga Adat sebagai Penyuluhan berbasis Masyarakat Dalam Pengelolaan Kaombo Ohusii**

Hutan Kaombo di Buton secara umum sangat dijaga oleh masyarakat adat melalui sebuah lembaga adat yang ada di masing-masing kampung. Keberadaan tanah Kaombo sangat bermanfaat bagi masyarakat mengingat di dalamnya terdapat berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya bagi mereka yang ingin melakukan hajatan dapat memperoleh bahan-bahannya dari Kaombo. Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil hasilnya berupa madu, rotan, ubi hutan, ayam hutan, serta hasil hutan lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat.

Pentingnya kawasan Kaombo bagi masyarakat Takimpo sangatlah nyata karena masyarakat sangat membutuhkannya terkait dengan beberapa aspek kehidupannya. Pada umumnya, masyarakat Buton utamanya yang terdapat di Kelurahan Takimpo memandang perlu untuk menjaga kelestarian hutan karena berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Di Buton ada sebuah semboyan yang menyatakan "*Bholimo Karo Somanamo Lipu* (mendahulukan kepentingan daerah daripada kepentingan diri sendiri). Dari semboyan tersebut rupanya melahirkan sebuah kesadaran akan pentingnya memelihara lingkungan alam dan tidak mengikutkan egoisme pribadi. Pengelolaan tanah adat Kaombo Ohusii oleh masyarakat Takimpo dipandu dan diarahkan oleh sebuah lembaga adat yang telah diorganisasikan di dalam masyarakat. Oleh mereka, lembaga adat tersebut lazim disebut "*Sarano Kampo* (Adat Kampung). Lembaga adat inilah yang kemudian merumuskan segala kebijakan dalam segala hal yang ada di masyarakat karena lembaga adat ini pengangkatannya langsung oleh Bupati dan mendapatkan SK resmi.

Fungsi lembaga adat sangatlah penting bagi masyarakat Takimpo. Lembaga adat sendiri berfungsi sebagai Penyuluh berbasis masyarakat dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam pengelolaan Hutan Adat Kaombo. Keberadaan lembaga adat sebagai penyuluh berbasis masyarakat di kelurahan Takimpo terdiri dari kepala adat yakni Parabela yang dibantu oleh beberapa perangkat di

bawahnya yaitu *Wati*, *Pocuno Limbo*, dan Pejabat PPN. Ada pula tokoh agama yang ikut membantu, yaitu *moji* (orang yang bertugas membaca hidangan pada saat pesta adat kampung), *Khatibi* (setingkat dengan *moji* dan bisa menggantikan *moji* jika berhalangan), dan *Mukimu* (pesuruh imam). Adapun pihak yang paling berperan di hutan biasanya adalah *wati* sebagai kaki tangan *Parabela* dan *Pocuno Limbo* sebagai kaki tangan tokoh-tokoh adat. Semua perangkat adat yang ada dalam masyarakat senantiasa saling bekerja sama demi kemaslahatanarganya.

Adapun pembagian tugas dari lembaga adat Kelurahan Takimpo dalam melakukan Penyuluhan Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:

### 1. *Parabela*

Salah satu peran *Parabela* yakni sebagai pemimpin atau ketua adat. Ini merupakan peran yang sangat utama bagi *Parabela* dan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Segala sesuatu yang dipimpin oleh *Parabela* baik berupa perintah ataupun nasehat, serta hal-hal lainnya yang diyakini oleh masyarakat sebagai sesuatu yang patut diindahkan. *Parabela* merupakan wakil dari masyarakat jika ia dibutuhkan oleh pejabat formal setempat. Kepemimpinannya dapat dilihat dari kemampuannya menghimpun dan menggerakkan masyarakatnya. Apabila ia memberi perintah, masyarakat sangat mematuhi, karena ini berkaitan dengan budaya dan kepercayaan masyarakat setempat yang telah berlangsung sejak lama. *Parabela* juga bertugas memulai segala kegiatan masyarakat seperti panen, penebangan lahan baru dan lain sebagainya. Masyarakat meyakini bahwasannya keberhasilan sebuah kegiatan yang mereka lakukan sangat ditentukan oleh siapa *Parabela* yang menjabat saat itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa keamanan dan kesejahteraan dalam kampung sangat tergantung pada *kabarakati* (keberkahan) atau kesaktian yang dimiliki oleh *parabela* yang menjabat. Olehnya itu, sosok *Parabela* dinilai sangat berjasa dalam masyarakat Buton seperti halnya pada masyarakat Takimpo hingga saat ini.

Berangkat dari perannya sebagai ketua adat dan pemangku segala kebijakan yang ada dalam masyarakat, *parabela* juga berperan sebagai Ketua Penyuluh berbasis masyarakat dalam mengelola dan menjaga Hutan Janda. Perannya tersebut adalah menjaga dan mengawasi Hutan Janda dari tindakan pelanggaran dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat mengancam kelestarian Hutan Janda tersebut. Apabila ada masyarakat yang melanggar, maka akan dilaporkan ke lembaga adat dan *parabela* juga akan memberikan sanksi berdasarkan persetujuan masyarakat dan seluruh perangkat adat setempat.

Terkait dengan perannya tersebut, Bapak La Aisi (75 tahun) sebagai *Parabela* di Kelurahan Takimpo menjelaskan:

“saya sudah 20 tahun lebih menjabat jadi ketua adat di Takimpo. Segala hal yang menyangkut adat, saya bersama para tokoh adat yang lainnya seperti *wati* dan *pocuno limbo* bersama-sama dirundingkan terlebih dahulu kemudian disepakati secara bersama-sama. Ini semua karena budaya leluhur kita, *tokabhangue liwunto* (kita bangun kampung ini). Pokoknya segala apa yang hendak dilakukan baik itu dalam kampung apalagi di kawasan hutan adat/ Hutan Janda, harus tetap melalui kami. Siapapun orangnya, tidak pandang tua ataupun muda. Ini juga sudah jadi tradisi turun temurun dari kami di sini. Maksudnya kami izin itu supaya kampung kita mendapatkan keberkahan (*kabarakati*) dari mereka.

Berdasarkan penuturan *parabela*, lembaga adat di Kelurahan Takimpo sangat berfungsi sebagai Ketua Penyuluh dalam menjaga dan pengelolaan Hutan Janda. Di Kawasan Hutan Janda setiap tahunnya selalu diadakan ritual-ritual pemberian sesajen kepada para leluhur dalam bentuk makanan dan minuman yang disimpan di bawah pohon. Sebelum ditinggalkan, terlebih dahulu dilakukan pengasapan dengan menggunakan *Dupa* (membakar lilin atau gula pasir) agar aroma asapnya tercium oleh arwah para leluhur. Hal tersebut diyakini sepenuhnya oleh masyarakat dapat memberikan kesenangan kepada para leluhur di kawasan hutan adar Takimpo sehingga mereka terus dilindungi dan diberi keberkahan dalam hidupnya. Dalam pelaksanaan ritual adat tersebut, *parabela* memegang peranan yang sangat penting. Dialah kunci dari segala proses ritual dari awal hingga akhir.

## 2. *Wati*

*Wati* merupakan wakil *parabela* yang bertugas membantunya dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam kegiatan penyuluhan berbasis masyarakat dalam hal pengelolaan Hutan Adat *Kaombo/ Hutan Janda*. *Wati* akan menggantikan *Parabela* apabila berhalangan. Tugas-tugas yang dijalankan sebagai penyuluh pun sama dengan apa yang diamanahkan kepada *parabela*. Hanya saja, apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, maka *wati* wajib mendiskusikannya terlebih dahulu dengan *parabela*, lalu mereka secara bersama-sama berembung dengan tokoh-tokoh adat lainnya, selanjutnya ditetapkanlah sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Adat merupakan suatu hal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Takimpo, terlebih oleh para pemuka adat di dalamnya. Olehnya itu, ada sanksi yang ditetapkan kepada para pelanggar ketentuan adat. Sanksinya mulai dari yang ringan sampai kepada yang berat, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Apabila ada masyarakat yang mengambil hasil hutan tanpa izin, maka akan dikenakan *kalamba* (sanksi) terhadap apa yang dilakukannya. Biasanya, sanksi yang ditetapkan berupa uang sebesar 12 *bhoka* (1 *bhoka* = Rp. 24.000). selain sanksi berupa uang juga, ada sanksi sosial yang diberikan kepada para pelanggar ketentuan adat, yakni dikucilkan dari masyarakat dan tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat karena tindakannya dinilai sebagai sesuatu yang

memalukan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk seluruh keluarganya dan memalukan komunitas adat yang ada di kampung. Sanksi sosial inilah sesungguhnya yang paling ditakuti oleh masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh saudara Sardin (28 tahun) tentang ungkapan seseorang yang pernah dikenai *lamba* alias dikucilkan dari masyarakat.

“ pernah ada orang yang pergi menebang kayu di *Ohusii*, saat itu dia tidak meminta izin kepada tokoh adat. Saat itu juga para masyarakat melaporkan kejadian itu kepada kepala lingkungan, dan dari kepala lingkunganlah informasi itu disampaikan kepada *Parabela*. Maka tindakan yang dilakukan oleh *parabela* adalah bermusyawarah dengan para tokoh adat dan tokoh agama untuk kemudian mendatangi rumah orang yang mengambil hasil hutan tanpa izin dan ia didenda. Tapi ternyata dia belum tobat dengan kalamba pake uang. Akhirnya, terpaksa dia dilamba dengan sanksi sosial itu tadi. Tidak diajak bicara, kalau ada pesta kampung tidak pernah dilibatkan. Sampai pada akhirnya dia sadar dan datang meminta maaf sama *parabela*, sehingga ia bisa diterima kembali dalam masyarakat”

Ternyata lembaga adat sebagai penyuluh berbasis masyarakat memang memberikan pengaruh yang nyata dalam hal pengelolaan dan menjaga kawasan Hutan Janda. Terbukti setiap hal yang diputuskan oleh mereka selalu memberikan hasil yang baik. Segala bentuk pelanggaran dikembalikan kepada lembaga adat, sehingga masyarakatpun merasa takut jika telah diberi sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.

### **3. Pocuno Limbo**

*Pocuno Limbo* adalah pihak yang paling banyak berperan langsung dalam Penyuluhan berbasis masyarakat dalam melindungi dan menjaga serta pengelolaan *Kaombo Ohusii*. Ia adalah kaki tangan *sara* yang apabila ada masyarakat ingin mengambil hasil hutan, maka ia memberikan arahan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat di kawasan Hutan Janda. Meskipun memegang peranan penting dalam pengelolaan hutan, akan tetapi ia juga harus menunggu keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi dalam adat Takimpo.

Proses musyawarah dilakukan di Baruga, baik yang berada di Kampung Lama maupun dikampung Baru dalam membahas bagaimana strategi yang dilakukan penyuluh berbasis masyarakat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan janda.

Dalam kesempatan itu, ada penuturan yang disampaikan oleh *Parabela* yang intinya adalah agar masyarakat senantiasa mematuhi segala ketentuan adat yang telah ditetapkan bersama termasuk di dalamnya dalam hal penjagaan kawasan *Kaombo / Takimpo Lipuogena* (hutan adat di Takimpo Kampung Besar) termasuk di dalamnya Hutan Janda. *Parabela* juga mengharapkan agar para pelanggar adat yang selama setahun ini, tidak akan melakukan kesalahannya lagi agar tidak akan ada malapetaka yang nantinya membahayakan kampung Takimpo. Pelaksanaan musyawarah di Baruga biasanya diakhiri dengan pembacaan do'a selamat bagi kampung, acara salam-salaman dan berbagai

hiburan oleh masyarakat Takimpo itu sendiri. Adapun para peragkat adat senantiasa melakukan pengawasan serta penjagaan di kawasan tanah adat Kaombo yang di dalamnya terdapat hutan janda.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Penyuluhan berbasis masyarakat di Kelurahan Takimpo melalui peran lembaga adat "Sarano Kampo" dalam pengelolaan Hutan Janda (*Kaombo Ohusii*) menunjukkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam menjaga sumber daya alam secara berkelanjutan. Nilai-nilai lokal, seperti falsafah "*pobhinci-bhinciki kuli*," menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang inklusif dan adil. Keterlibatan struktur adat juga membantu adaptasi strategi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan, yang mendukung pelestarian hutan dan pembangunan sosial yang lebih adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, Achmad. Kristian, nobel. Safkaur, otniel. Makbul, yogi. Siswanti. Rahmiati, Dini. Husain, M. Najib and Nuwairah, Nahed. 2024. Investigating Electronic Human Resource Management System, Sustainable Innovation, and Organizational Agility on Sustainable Competitive advantage in the Manufacturing Industries. *International Journal of Data and Network Science* (8) 2024.
- Astawan, Made. 2008. "Efforts to Develop Traditional Indonesian Food", in Kusumastanto, Tri Doyo (Editor Team), *Thoughts of Professors at the Bogor Agricultural Institute: Perspectives on Agricultural Sciences in National Development*. Published in collaboration with Swadaya Publishers and IPB Press. Bandung.
- Atmadja, S., Komarudin, H., Sills, E., & Pattanayak, S. (2019). Gender and forests in Indonesia: Empowerment, income, and well-being. *World Development*, 122, 180-191. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.026>
- Budiarno, Abdul Halim, Bambang AH, Jamaluddin S, Zahron H, Sabar S, Saptorini, Bambang S, dan Neneng N, 2004. *Kondisi Penyuluhan Pertanian Dewasa ini. Laporan Pengkajian*. Pusat Pengkajian SDM Pertanian. Badan Pengembangan SDM Pertanian. Departemen Pertanian.
- Cangara, Hafied. 2000. *Introduction to Communication Science*. Check 2. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cárcamo, P. F., Wyborn, C., Watene, K., & Wehi, P. M. (2020). Effective communication and authentic governing of indigenous peoples' effective exercise of self-governance over their lands, territories and resources. *Human Ecology*, 48(4), 495-507. <https://doi.org/10.1007/s10745-020-00174-9>
- Chaudhary, S., Bejarano, T., McCall, M. K., & Shova, T. (2022). Participatory communication for the integration of Indigenous and scientific knowledge in natural resource management. *World Development*, 154, 105888. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105888>
- Fernández-Llamazares, Á., Lepofsky, D., Lertzman, K., Armstrong, C. G., Brondizio, E. S., Gavin, M. C., ... & Salpeteur, M. (2020). A pluralistic approach to explore the diversity of

---

Indigenous tenurial rights regimes. *Human Ecology*, 48(6), 737-748.  
<https://doi.org/10.1007/s10745-020-00190-9>

Liao, C., Deng, J., Pang, Y., & Ding, Y. (2020). Participatory communication for development: A triple-track for integrating indigenous culture, scientific knowledge, and sustainable development. *Humanities and Social Sciences Communications*, 7(1), 1-12.  
<https://doi.org/10.1057/s41599-020-00623-0>

Husain, M. N., Anggraini, D., & Anawai, S. (2020). Kampanye pemasaran sosial gemar membaca berbasis media sosial di masa pandemi covid-19. *Prosiding Nasional Covid-19*, 1-14.

Husain, M. N. (2011). Tata Kelola Komunikasi Lingkungan Pada Kepemimpinan Parabela Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Buton. *Jurnal, Konferensi Komunikasi Nasional, "Membumikan Ilmu Komunikasi di Indonesia" Depok*, 9-10.

Husain, M. N. (2011). Penerapan Komunikasi Politik dalam Penetapan Peraturan Daerah Kota Kendari. *Jurnal ASPIKOM*, 1(3), 211-222.

Husain, M. N. (2014). *Kepemimpinan Parabela terhadap Sikap Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Kawasan Hutan Kaombo di Kabupaten Buton* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Husain, M. N. Khoiriyah. Jumintono. Wasan, Aan. Wiryanto, Wisber. V. Vadim. Ponkrotov. (2024). Investigating The Role of Culture and Tourism in The Economic and Social development of Developing Countries and its Impact on Global Growth.

Kotler Philip, and Roberto L. Eduardo 1989. *Social Marketing: Strategies for Changing Public Behavior*. Macmillan Publishers London.

Littlejohn, S.W. 1995. *Theories of Human Communications*. Hunebaldt State University. Washington.

Mulyana, Deddy. 2001. *Communication Science An Introduction*. Rosdakarya Teenager. Bandung.

Sarmiento Barletti, J. P., Larson, A. M., Hewlett, C., & Delgado, D. (2020). Designing for engagement: A participatory approach for the inclusion of Indigenous Peoples in policy formulation. *Forests, Trees and Livelihoods*, 29(4), 235-251.  
<https://doi.org/10.1080/14728028.2020.1839708>

Subejo. 2002. *Penyuluhan Pertanian Indonesia: Isu Privatisasi dan Implikasinya*, *Jurnal Agro Ekonomi* Vol.9 No.2, Edisi Desember 2002, Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian UGM.

Subejo, 2006. *Penyuluhan Pertanian Indonesia di Tengah Isu desentralisasi, Privatisasi dan Demokratisasi*. *Jurnal Penyuluhan*. IPB. Vol 2. No.2 Tahun 2006. Hal 69-76.

Sumarjo, 2012. *Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan keilmuan Sosiologi dan penyuluhan Pertanian yang sesuai dengan Kebutuhan pembangunan*. *Makalah Lokakarya Nasional. Menggagas Arah Pendidikan sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Masa Depan*. *Laboratorium Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Universitas Padjadjaran*. Hal. 3-28